

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa secara manual atau konvensional yang dilakukan dengan cara tatap muka antara panitia lelang dengan penyedia jasa memiliki banyak permasalahan. Permasalahan itu antara lain terjadinya suap agar dapat memenangkan lelang, dalam proses lelang yang tidak transparan dan pengusaha yang mengikuti lelang banyak yang tidak memenuhi kualifikasi dalam segi persyaratan (Udoyono, 2012). Dari permasalahan yang ada pemerintah ingin perubahan dari pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut guna untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pemerintah harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya (Semil, 2005).

Dengan banyaknya tuntutan yang ada, salah satunya upaya pemerintah peningkatan pelayanan publik yang baik adalah dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya *good governance* ini pemerintah mewujudkan sebuah agenda yang diantaranya menciptakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi demi kelancaran yang diinginkan. Untuk itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan sebuah kebijakan yang baik pada kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur harus bagus dan juga sistem pengawasan harus efektif (Hardiyansyah, 2018).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang baik adalah dengan cara perubahan atau reformasi dalam tata pemerintahan dengan menerapkan kegiatan yang didukung oleh teknologi informasi (*e-government*). Salah satu penerapan *e-government* di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) (Basrie, 2017).

Alasan diterapkannya pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau *e-procurement* di Indonesia karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada pengadaan barang atau jasa ini. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa rentannya kasus korupsi yang ada di pengadaan barang atau jasa tahun 2017 terdapat 84 kasus yang teridentifikasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (Wildansyah, 2018). Kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sangat rentan ketika proses lelang. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga menyatakan masih banyak lembaga-lembaga yang belum melaporkan pengadaan barang dan jasa pada sistem yang telah disediakan melalui website <http://monev.lkpp.go.id/> (Wildansyah, 2018).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* ini di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sistem pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan yang mempunyai jasa atau produk yang dibutuhkan, yang dalam pelaksanaannya

melalui internet. Banyaknya penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan adanya kebijakan ini di harapkan bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dan penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya *e-procurement* ini kegiatan pengadaan dilakukan lebih transparan, lebih hemat waktu dan lebih mudah melakukan pertanggung jawaban keuangan (Kasiwi, 2015).

Kebijakan *e-procurement* di Indonesia dimulai sejak tahun 2006 yang ditandai dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa – Bappenas pada tahun 2006 yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Yulianto, 2010). Akan tetapi *e-procurement* ini merupakan program pemerintah yang baru dimulai sejak tahun 2008 dengan diciptakannya INAPROC (Nurmandi & Sunhyuk, 2015).

INAPROC yang merupakan portal atau sistem *e-procurement* nasional, guna untuk mendapatkan dan memberikan barang dan jasa secara elektronik. Yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk pada tahun 2007 oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan perkembangan dari lembaga pusat pengadaan yang sebelumnya berada di lingkungan Bappenas.

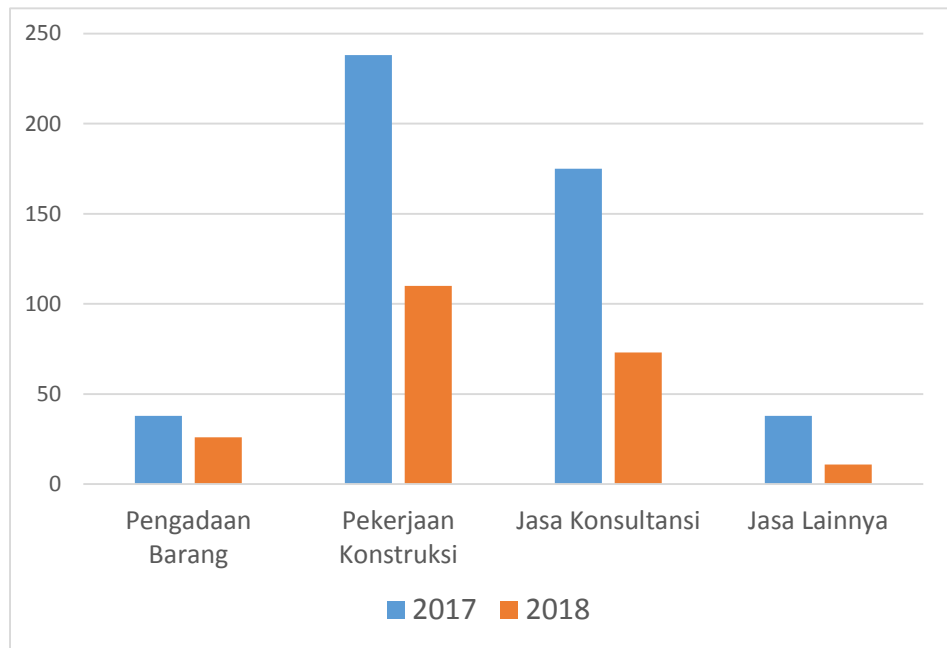
E-procurement ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan barang dan jasa yang dahulunya di instansi pemerintah yang dilaksanakan dengan metode manual, dengan adanya kebijakan baru yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Yang mana semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan internet. *E-procurement* ini merupakan sebuah inovasi pelayanan yang baik.

Perkembangan teknologi seperti sekarang ini sudah seharusnya dijadikan sebagai momen yang bagus bagi pemerintah Kota Batam untuk melakukan atau mengadopsi sistem *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih mudah terkait pengadaan barang dan jasa. Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam mengimplementasi sistem *e-procurement*. LPSE Kota Batam mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan alamat website (<https://lpse.batam.go.id/eproc/>). Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa secara khusus, belanja barang dan modal pada umumnya dapat dilaksanakan lebih cepat (Nasution, 2012).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam ini dalam menjalankan tugasnya mengikuti panduan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik. Adapun jumlah paket lelang yang telah dilakukan LPSE Kota Batam sebagai berikut :

Grafik 1.1
Jumlah Paket Lelang LPSE Kota Batam Tahun 2017-2018



Sumber: *Website* LPSE Kota Batam, 2019.

Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan yang didalamnya termasuk pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan diharapkan informasi-informasi yang terkait pengadaan dapat terkompilasi dan terintegrasi dengan baik dan lengkap sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat dari informasi pengadaan.

Keberhasilan kerja pegawai yang dilihat dari segi kuantitas dan kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari pegawai itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk meningkatkan keberhasilan

suatu organisasi atau lembaga. Kinerja pegawai dilihat dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam perumusan perencanaan strategis oleh sebuah organisasi atau lembaga. Kinerja pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Rahmadhani, 2016).

Jika dilihat dari kualitas pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu sendiri masih sering terjadi permasalahan yang sering mereka alami seperti dapat dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), walaupun anggota bersertifikat namun kenyataan masih ada yang kurang memahami proses pengadaan barang atau jasa tersebut seperti proses tahapan dalam lelang antara lain mulai dari Pengumuman Pascakualifikasi, Pemberian Penjelasan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Masa Sanggah Hasil Lelang, sampai proses pendatangan kontrak (Barahona, 2012). Pada laporan kinerja yang dikeluarkan oleh LKPP tahun 2016 masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan pihak LPSE dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang terjadi seperti, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan dan pola pikir pelaksana belum sesuai dengan prinsip pengadaan. Dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka peneliti ingin melihat apakah permasalahan tersebut dapat diatasi pada tahun berikutnya pada tahun 2017 dan 2018.

Dari pemaparan permasalahan tersebut penulis membahas tentang kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Yang mana judul dari penelitian ini Evaluasi Kinerja *E-Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam Tahun 2017-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, peneliti melakukan evaluasi pelayanan yang akan difokuskan pada :

- a. Bagaimana kinerja *E-Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam tahun 2017-2018 ?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kota Batam tahun 2017-2018.
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- b. Dapat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi kinerja pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*e-procurement*).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah informasi bagi instansi mengenai pentingnya evaluasi kinerja pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*.
- b. Dapat meningkatkan kinerja demi kelancaran kegiatan operasional.
- c. Dapat menambah wawasan serta memberikan informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan tema evaluasi kebijakan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa, antara lain:

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti dan Tahun diteliti	Judul	Kesimpulan
1.	(Lovina & Candra, 2013)	Evaluasi Penerapan Aplikasi <i>E-Procurement</i> (LPSE) terhadap Partisipasi <i>E-Marketplace</i> serta Dampaknya Kepada Kinerja dengan Kepercayaan sebagai Modertor (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi)	Implementasi <i>E-Procurement</i> sangat berpengaruh terhadap kinerja melalui partisipasi <i>E-Marketplace</i> , namun <i>Trust</i> (kepercayaan) sebagai variabel moderator secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi <i>e-procurement</i> dan partisipasi <i>e-marketplace</i> . Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan pengadaan yang diberikan sehingga dapat menarik lebih banyak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan <i>E-Marketplace</i> sehingga terpenuhinya kebutuhan mereka.

2	(Siregar, 2017)	Evaluasi <i>E-Procurement</i> pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung)	Penerapan <i>E-procurement</i> di Kota Bandung masih terdapat banyak masalah pada saat menggunakan sistem konvensional dan permasalahan akibat peralihan dari lindungan Bappeda menjadi di bawah layanan pengadaan SETDA hal ini mengakibatkan kurangnya jumlah pegawai pada LPSE Kota Bandung. Terdapat kendala pada koneksi internet yang mengakibatkan terhentinya kegiatan itu sendiri, dari kendala itu otomatis akun yang telah dipakai akan terblokir karena dari pihak penyedia melakukan pendaftaran ganda.
3	(Anton, 2010)	Evaluasi Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> di Lingkungan Kota Tegal Tahun 2010	Pelaksanaan Program <i>e-procurement</i> di LPSE Kota Tegal sudah dinyatakan baik, karena untuk membangun sebuah sistem <i>e-procurement</i> yang ideal membutuhkan dana yang besar, dana yang dikeluarkan oleh LPSE Kota Tegal sebanyak 600 juta yang mana dialokasikan untuk kebutuhan sistem <i>e-procurement</i> . Akan tetapi masih memiliki kendala-kendala yang dialami seperti keterbatasan SDM pengelola LPSE, kurangnya koordinasi antara sebagian panitia, masalah teknis dari pusat, apabila terjadi perbaikan maka sistem menjadi terhenti yang

			mengakibatkan proses penawaran tidak berjalan dengan baik dan panitia pengadaan masih belum banyak yang menguasai aplikasi.
4	(Apituley, Djakfar, & Wijatmiko, 2014)	Evaluasi Penerapan <i>E-Procurement</i> Pada Pengadaan Infrastruktur Pada Instansi Pemerintah di Kota Ambon	Pada evaluasi penerapan <i>e-procurement</i> di Kota Ambon dilihat dari pengembangan terhadap kinerja yang di ukur dari segi waktu, biaya dan sumberdaya. <i>E-procurement</i> dinyatakan lebih unggul dibandingkan dengan sistem yang konvensional.
5	(Sofyaningrum, 2010)	Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Prespektif <i>Good Governance</i> di Departemen Komunikasi dan Informasi.	Dalam penelitian ini mengetahui bagaimana evaluasi penaran SePP (Sistem E-Pengadaan Pemerintah) dengan perspektif <i>good governance</i> , dimensi yang digunakan antara lain efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.
6	(Nasution, 2012)	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Pada LPSE Kementerian Keuangan	<i>E-procurement</i> di LPSE Kementerian Keuangan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, SOP masih mengikuti ketentuan pengadaan secara manual sehingga masih terkesan terdapat banyak masalah. Mengukur evaluasi dengan mengacu tujuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang tercantum pada Perpres nomor 54 tahun 2010 yang berisi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha

			yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit dan akses informasi yang real time.
7	(Kusumo, 2013)	Evaluasi Kinerja Pokja UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengadaan Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dalam penelitian ini evaluasi kinerja pokja dalam mewujudkan akuntabilitas belum sempurna atau masih banyak kendala didalamnya, dalam menjalankan tugasnya masih belum mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
8	(Nurhidayati, Munawir, & Suryo, 2017)	Persepsi Pemilik Proyek Dalam Lingkungan LPSE Terhadap Penilaian Kinerja Kontraktor	Hasil dari penelitian ini faktor yang menjadi penilaian dalam kriteria kinerja adalah kriteria produk atau tim teknis dan panitia penerima hasil pekerjaan.
9	(Ilahiyyah & Pujotomo, 2014)	Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dengan Menggunakan Indonesia Procurement Maturity Model di Unit Layanan Pengadaan Universitas Diponegoro	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan ULP Universitas Diponegoro berada pada tahap proactive. Yang menjadi kelemahan pada tingkat SDM ULP karena kekurangan tim evaluator, tim ini ada jika terjadi mutasi pegawai saja, pengembangan potensi pegawai hanya dengan cara pelatihan saja.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang tinjauan pustaka di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut terdapat dalam (Kusumo, 2013) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pokja dalam mewujudkan akuntabilitas dapat dikatakan belum sempurna atau masih banyak kendala didalamnya dan dalam

menjalankan tugasnya belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya dan dalam (Ilahiyyah & Pujotomo, 2014) evaluasi kinerja *e-procurement* pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Diponegoro dijelaskan bahwa pengembangan potensi pegawai hanya dengan cara pelatihan saja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengevaluasi kinerja *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam yang mana belum pernah diteliti sebelumnya dan pada penelitian ini yang membedakan adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja yaitu responsivitas dan akuntabilitas menurut (Agus Dwiyanto, 2006) serta ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Evaluasi Kinerja

1.6.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana atau bagaimana suatu program dalam pencapaian hasil. Evaluasi juga biasanya untuk menilai sejauhmana sebuah kebijakan berjalan atau tidak untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Menurut Anderson dalam (Haslan, 2013) menyatakan bahwa evaluasi sebagai penilaian dari implementasi dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Sedangkan menurut (Suchman 2010), evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan hasil

yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan yang telah direncanakan agar mendukung pencapaian tujuan.

Menurut pendapat *Commonwealth of Australia Department of Finance* mengemukakan bahwa evaluasi suatu kegiatan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi ini dapat mengukur antara lain :

1. Input suatu program yang dipergunakan untuk memaksimalkan output (efisiensi)
2. Hasil dari program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (efektifitas)
3. Sasaran program sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. (*Commonwealth of Australia Department of Finance*, 1989).

Menurut pemaparan diatas, dijelaskan bahwa evaluasi bisa dilihat dari segi sejauh mana suatu program agar mendapat hasil yang maksimal, evaluasi juga dapat dilihat dari segi pencapaian tugas yang berguna untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu program dan evaluasi juga bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan.

1.6.1.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi antara lain (Tim Penyusun Modul Sistem AKIP, 2007) :

1. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid tentang program dan kegiatan, kinerja dari sebuah kebijakan agar tercapainya suatu tujuan, sasaran dan target.

2. Evaluasi ini dapat memberi kritikan pada sebuah klarifikasi yang berbentuk nilai dari tujuan dan target.
3. Evaluasi dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kembali sebuah kebijakan dalam organisasi atau instansi.

Yang dapat disimpulkan dari tujuan dan fungsi evaluasi ini adalah dapat memperoleh gambaran suatu kegiatan untuk membandingkan hasil pelaksanaan yang telah dicapai dengan rencang yang telah dirancang sebelumnya, jika terdapat kesalahan dapat segera diperbaiki.

1.6.1.3 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah sebuah hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorang, sekelompok atau organisasi yang dimana mereka memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Kinerja juga bisa disebut sebagai acuan kesuksesan pelaku kepentingan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diperbuatnya (Destiasari, 2015). Adapula pengertian kinerja menurut para ahli, sebagai berikut :

Menurut (Simamora, 1995), kinerja sebagai acuan untuk melihat tingkat keberhasilan yang di lihat dari persyaratan pekerjaan. Sedangkan menurut (Robbins, 1996) kinerja merupakan hasil dari evaluasi yang dilihat dengan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Siagian, 2008) kegunaan kinerja bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai kemampuan, pelatihan, kekurangan dan potensi yang dimiliki seseorang agar bermanfaat untuk mencapai sasaran atau tujuan. Sedangkan bagi organisasi atau instansi hasil

dari kinerja sangat penting jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan dalam konteks kebutuhan pelatihan, seleksi dan manajemen SDM.

Jadi dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu capaian dari suatu pelaksanaan dari sebuah program kegiatan atau kebijakan demi terwujudnya sasaran, tujuan dan misi dari organisasi dan kinerja merupakan suatu *output* yang dapat dihasilkan dari fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam kurun waktu tertentu.

1.6.1.4 Indikator Kinerja

Menurut Robbins (dalam Tika, 2006) indikator untuk mengukur kinerja ada empat, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan biaya dan kemandirian. Berikut penjelasan dari indikator tersebut :

1. Kualitas, untuk mengukur kualitas kinerja dapat dilihat dari kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pemangku kepentingan.
2. Kuantitas, untuk mengukur kuantitas dari kinerja ini dilihat dari jumlah atau unit yang dapat diselesaikan oleh pemangku kepentingan.
3. Ketepatan waktu dan biaya, dalam kinerja hal ini dilihat dari waktu pencapaian dari waktu yang telah ditetapkan, dan biaya dilihat dari penghematan dengan hasil *output*.
4. Kemandirian, hal ini dilihat dari komitmen dengan instansi dan tanggungjawab dengan pekerjaannya.

1.6.1.5 Pengertian Evaluasi Kinerja

Menurut Charles O. Jones dalam (Aprilia, 2009) menyatakan bahwa “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” yang artinya (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Sedangkan Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah “suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” (Simanjuntak, 2005).

Evaluasi kinerja juga bisa disebut sebagai kegiatan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dijadikan umpan balik (*feedback*) untuk membuat keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya (Hadari, 2006). Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
3. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Berdasarkan pemaparan dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang

dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

1.6.1.6 Fungsi Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja memiliki fungsi yang dikemukakan oleh (Wirawan, 2009) sebagai berikut :

1. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objectives, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun
2. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya.
3. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.

4. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.

Berdasarkan fungsi diatas, evaluasi kinerja merupakan suatu alat yang digunakan oleh instansi atau pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja dari aparturnya.

1.6.1.7 Tujuan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Adapun beberapa tujuan dari evaluasi kinerja organisasi menurut (Darma, 2009) sebagai berikut:

1. Pengembangan, bertujuan untuk mngetahui pegawai mana yang perlu di *training* sehingga dapat tercapainya tujuan suatu organisasi.
2. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), dapat bermanfaat bagi suatu organisasi untuk pengembangan keahlian dan keterampilan.
3. Kompensasi, dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai mana yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana memberi kompensasi yang adil.

4. Komunikasi, evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pada organisasinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, evaluasi kinerja organisasi bertujuan untuk membantu sebuah manajemen kerja pada instansi pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kinerja yang kurang maksimal.

1.6.1.8 Indikator Evaluasi Kinerja

Indikator evaluasi kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri. Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik (Mahmudi, 2015).

Evaluasi kinerja organisasi merupakan alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut (Mashun, 2013) terdapat 6 (enam) dimensi untuk mengevaluasi kinerja organisasi, sebagai berikut:

1. Masukan (*input*), merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Proses (*process*), merupakan organisasi dapat merumuskan ukuran kegiatan dalam aspek kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Keluaran (*output*), merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik. Pada intinya indikator keluaran ini yang mengukur hasil dari suatu kegiatan.
4. Hasil (*outcome*), merupakan segala yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Manfaat (*benefit*), merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Dampak (*impact*), merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Sedangkan menurut (Agus Dwiyanto, 2006) terdapat indikator untuk menilai kinerja, sebagai berikut :

Table 1.2
Indikator Evaluasi Kinerja

No	Indikator Evaluasi Kinerja	Penjelasan
1.	Produktivitas	Produktivitas ini diukur dari tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan. Dipahami sebagai rasio antara <i>input</i> dan <i>output</i> .
2.	Kualitas Layanan	Kualitas layanan ini dilihat dari munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
3.	Responsivitas	Responsivitas merupakan salah satu konsep yang digunakan sebagai aspek untuk menilai kinerja. Responsivitas ini merupakan kemampuan daya tanggap yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4.	Akuntabilitas	Akuntabilitas pelayanan publik instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen pertanggungjawaban.

Dari berbagai macam indikator pengukur kinerja yang diungkapkan oleh para ahli di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukur kinerja yang dikemukakan oleh (Agus Dwiyanto, 2006). Peneliti memilih menggunakan

teori ini karena sesuai atau lebih tepat untuk mengukur kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

Indikator pengukur kinerja yang dikemukakan oleh (Agus Dwiyanto, 2006) meliputi empat indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan akuntabilitas. Dari empat indikator di atas peneliti memilih untuk menggunakan dua indikator saja yaitu responsivitas dan akuntabilitas. Kedua indikator tersebut dipilih dengan alasan bahwa indikator ini sesuai untuk mengukur kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

1.6.2 Faktor yang mempengaruhi kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soesilo dalam (Tangkilisan, 2005) kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Dari pemaparan di atas, menurut Soesilo dalam (Tangkilisan, 2005) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kinerja. Dari keempat faktor tersebut peneliti memilih empat faktor tersebut untuk dijadikan indikator yaitu struktur organisai, kebijakan pengelolaan berupa visi misi organisasi, sumber daya manusia dan sarana atau prasana. Keempat faktor tersebut yang sesuai dengan judul penelitian ini.

1.6.3 *E-procurement*

1.6.3.1 Pengertian *E-Procurement*

E-Procurement merupakan tranformasi mekanisme pengadaan barang atau jasa secara manual. Menurut (Davila, Gupta, & Palmer, 2004) menyebutkan *e-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang/jasa melalui internet yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau yang disebut *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dengan ketentuan perundang-undangan. *E-Procurement* merupakan tranformasi mekanisme pengadaan barang atau jasa secara manual. Menurut (Davila et al., 2004) menyebutkan *e-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang/jasa melalui

internet yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik ini dioperasikan oleh suatu lembaga yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE hanya sebagai fasilitator, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP).

1.6.3.2 Tujuan *E-procurement*

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada pasal 107 yang bertujuan untuk :

“(i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (ii) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (iii) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (iv) Mendukung proses monitoring dan audit, dan (v) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time”.

Penerapan *e-procurement* sebagaimana telah diungkapkan oleh Willem (2012) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan dimensi penerapan *e-procurement*, Willem (2012) mengemukakan bahwa untuk mendukung penerapan *e-procurement* ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi yang meliputi:

1. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-

singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

2. Efektif, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Bertanggung jawab, mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

1.6.3.3 Tahapan *E-Procurement*

Tahapan *e-procurement* menurut Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi *e-procurement*, dijelaskannya sebagai berikut:

1. Tahap *disclosure* Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya *pilot project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.
2. Tahap *resgitation and distribution* Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement mendisclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasi-kasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang

elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan.

3. Tahap *electronic bidding* Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamaan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Datadata yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.
4. Tahap *advanced support services*, pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui

internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement telah mencapai titik optimal.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjabaran dari teori-teori yang ada, maka penulis menulis definisi konseptual sebagai berikut :

- a. Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja dari pekerjaan yang telah dilakukan mengalami peningkatan atau penurunan sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai acuan pada masa yang akan datang.
- b. *E-Procurement* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.8 Definisi Operasional

Table 1.3
Definisi Operasional

No	Teori	Dimensi	Indikator
1.	Evaluasi Kinerja	Responsivitas	Daya tanggap A. Tahapan lelang melalui masa sanggah B. Forum tanya jawab
		Akuntabilitas	A. Laporan Rencana Paket Pengadaan B. Laporan Progres Keuangan C. Laporan Progres Fisik
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	Pendukung	A. Sumber Daya Manusia melalui pelatihan B. Sarana atau Prasarana
		Penghambat	C. Struktur Organisasi D. Visi Misi Organisasi

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Yusuf, 2014) kualitatif merupakan suatu startegi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan cara serta disajikan secara naratif. Peneliatian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini dapat

dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi di lapangan. Dengan ini peneliti ikut berpartisipasi langsung untuk melihat fakta yang ada.

Alasan mengapa penulis ingin menggunakan jenis penelitian ini yaitu kualitatif karena pembuatan skripsi yang berjudul Evaluasi Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada *E-Procurement* di Kota Batam Tahun 2017-2018. Dengan judul tersebut peneliti ingin mengevaluasi bagaimana kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Batam.

1.9.2 Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka unit analisis pada penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja *e-procurement* dan faktor apa yang mempengaruhi kinerja pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam tahun 2017-2018.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan evaluasi kinerja *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam tahun 2017-2018. Berikut subjek dari penelitian ini:

Tabel 1.4
Subjek Penelitian

No	Narasumber	Instansi Narasumber
1	Indra Sufian, M.Eng	Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam
2	Raja Ria Mayasari, SE	Kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KOMINFO Kota Batam
3	Sartono	Karyawan CV. Almatra Buana
4	Tulus Wiky Yanto	Direktur PT. Tunesa Mulia Mandiri
5	Okie	Karyawan PT. Rancang Adhya Selaras
6	Neti	Karyawan PT. Astakona Citra Grafindo

1.9.4 Lokasi Penelitian

Dalam pengembangan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Batam, karena penulis ingin mengevaluasi bagaimana kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sesuai dengan judul dari penelitian ini adalah evaluasi kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian suatu objek, memerlukan data sebanyak mungkin. Karena data memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penelitian tersebut. Data yang terkait penelitian sangat banyak dan luas.

a) Data Primer

Terkait data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara langsung

kepada pilak LPSE, KOMINFO dan beberapa penyedia jasa di Kota Batam. Berikut data primer yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 1.5
Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Daya tanggap pelaksana dalam mengatasi keluhan penyedia jasa	Kepala Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.	Wawancara
Bimbingan kepada seluruh pelaksana	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Batam	Wawancara
Kualitas kinerja LPSE Kota Batam	Penyedia jasa yang mengikuti <i>e-procurement</i> di Kota Batam	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian. Berikut data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini:

Tabel 1.6
Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Data pemenang lelang Kota Batam tahun 2017-2018	<i>Website</i> LPSE Kota Batam
Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Internet
Laporan Rencana Pengadaan tahun 2017-2018	<i>Website</i> MONEV LKPP
Laporan Progres Fisik 2017-2018	<i>Website</i> MONEV LKPP
Laporan Progres Keuangan 2017-2018	<i>Website</i> MONEV LKPP
Data penyedia melakukan masa sanggah	<i>Website</i> LPSE Kota Batam

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik ini karena :

a) Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, karena akan mudah mendapatkan informasi yang berkaitan atau relevan dengan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2015) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara yang dilakukan sebagai penunjang penelitian in membutuhkan beberapa pihak. Pihak yang akan di wawancarai sebagai berikut :

Tabel 1.7
Daftar Narasumber

No	Nama Narasumber	Instansi/Penyedia Jasa
1	Indra Sufian, M. Eng	Kepala Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam
2	Raja Ria Mayasari, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian KOMINFO Kota Batam
3	Sartono	Penyedia Jasa yang mengikuti lelang secara elektronik di Kota Batam tahun 2017-2018
4	Tulus Wiky Yanto	Penyedia Jasa yang mengikuti lelang secara elektronik di Kota Batam tahun 2017-2018
5	Oki	Penyedia Jasa yang mengikuti lelang secara elektronik di Kota Batam tahun 2017-2018
6	Neti	Penyedia Jasa yang mengikuti lelang secara elektronik di Kota Batam tahun 2017-2018

Hasil yang didapatkan dari wawancara oleh peneliti akan dianalisis dan akan dirangkum dari keseluruhan jawaban dari narasumber untuk mendapatkan kesimpulan.

b) Dokumentasi

Menurut (Yusuf, 2014) dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dokumen yang menyangkut tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Langkah pengumpulan data kualitatif dengan mengamati atau menganalisis data yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain terkait suatu subjek. Hampir sejumlah data

yang ada adalah berwujud foto, surat-surat, cenderamata, catatan harian, artefak, laporan, dan sebagainya. Hal mendasar dari data ini tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di era sebelumnya. Lebih jelasnya, bahan dokumenter terbagi dari otobiografi, buku, surat-surat pribadi atau memorial, catatan harian, dokumen pemerintah atau swasta, klipping, data tersimpan di *website*, data di *server* dan *flashdisk*, dan lain-lain.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses merangkum, memberi kode dan memilih hal-hal yang penting. Reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Data *Display*

Data display ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat dari informasi yang didapatkan penulis sehingga menghasilkan kesimpulan dan tindakan yang berbentuk naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ini untuk menjawab sebuah rumusan masalah yang ada yang merupakan kegiatan akhir dari sebuah penelitian.